

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1. Sejarah Berdirinya PMI

Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Ke-II. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama *Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie* (Nerkai), yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang.

Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia sendiri diawali sekitar tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr Bahder Djohan. Rencana tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut ke dalam sidang Konferensi Nerkai pada tahun 1940 walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah. Terpaksa rancangan itu disimpan untuk menunggu kesempatan yang tepat. Seperti tak kenal menyerah, saat pendudukan Jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional, namun sekali lagi upaya itu mendapat halangan dari Pemerintah Tentara Jepang sehingga untuk kedua kalinya rancangan itu harus kembali disimpan.

Tujuh belas hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet I, pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia 5 yang terdiri dari: dr R. Mochtar (Ketua), dr. Bahder Djohan (Penulis), dan dr Djuhana; dr Marzuki; dr. Sitanala (anggota).

Akhirnya Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada 17 September 1945 dan merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara Internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Keppres No.25 tahun 1959 dan kemudian diperkuat dengan Keppres No.246 tahun 1963.

2.1.1. Visi Palang Merah Indonesia (PMI)

Palang Merah Indonesia (PMI) mampu dan siap menyediakan pelayanan kepalangmerahan dengan cepat dan tepat dengan berpegang teguh pada Prinsip - prinsip Dasar Palang Merah Internasional.

Menyebarkan, mengembangkan dan mendorong aplikasi secara konsisten prinsip dasar gerakan Palang Merah Internasional. Dengan melaksanakan peningkatan kemampuan organisasi secara berkelanjutan agar mampu melaksanakan tugas - tugas

2.1.2. Misi Palang Merah Indonesia (PMI)

1. Kesiap-siagaan di dalam Penanggulangan Bencana dan Konflik yang berbasis pada masyarakat.

2. Bantuan dalam bidang kesehatan, termasuk bantuan kesehatan dalam keadaan darurat yang berbasis pada masyarakat.
3. Pengelolaan Transfusi Darah secara profesional
4. Dukungan dalam HIV / AIDS yang mencakup usaha preventif, antistigma dan diskriminasi, serta dukungan dan kepedulian terhadap ODHA (Orang dengan HIV / AIDS) dan keluarganya.
5. Pengembangan dan penguatan kapasitas organisasi di seluruh jajaran PMI guna meningkatkan kualitas potensi sumber daya manusia, sumber daya dan dana agar visi misi dan program PMI dapat diwujudkan secara berkesinambungan.

2.1.3 Tujuan Palang Merah Indonesia

Meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya, yang tidak membedakan golongan, bangsa, kulit, jenis kelamin, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2.2. Sejarah Berdirinya PMI provinsi jawa timur

Palang Merah Indonesia Daerah Jawa Timur berdiri pada tahun 1960 dipimpin oleh seorang Komisaris yaitu dr. Angka Nitisastro dipilih melalui Musyawarah Daerah (MUSDA) PMI Jatim bertempat di Lembaga Kesehatan Negata (LKN) terletak di jalan Indrapura Surabaya. Sedangkan Markas Daerah pada waktu itu masih bergabung menjadi satu dengan Markas Cabang di Jalan Tunjungan No. 53 Surabaya pada tahun 1960. Kemudian pindah lagi ke Jl. Tunjungan 61 pada tahun 1963 dari Jl. Tunjungan 61 pindah ke Jl. Cempaka No. 2 tahun 1970. Pada tahun 1975 Markas PMI Daerah pindah ke Jl. Kalibokor No. 161 Surabaya, dan tahun

2003 Markas PMI Daerah Jawa Timur pindah lagi ke jl. Karang Menjangan No. 22 hingga sekarang ini. Sebutan PMI Daerah Jawa Timur sejak tahun 2010 berganti nama menjadi PMI Provinsi Jawa Timur.

Program - program yang dilaksanakan oleh PMI Provinsi Jawa Timur dalam rentang waktu lima tahun terakhir meliputi:

1. Penanggulangan Bencana (PB),
2. Program pelayanan kesehatan,
3. Program pelayanan sosial,
4. Program peningkatan fungsi / peran komunikasi dan informasi
5. serta program yang ditujukan untuk pengembangan kapasitas organisasi.

Pelatihan di PMI mempunyai tiga tujuan yaitu, pertama untuk mengembangkan misi organisasi, kedua, memenuhi kebutuhan pembelajaran terhadap suatu program atau pelayanan, ketiga, memenuhi kebutuhan pembelajaran Relawan.

Pelatihan Relawan PMI (KSR-TSR) harus diarahkan pada upaya peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis pelayanan kepalangmerahan dan pengembangan organisasi. Anggota Relawan PMI (KSR-TSR) dapat mengikuti Pelatihan sesuai minat dan bakat, untuk dapat menjalankan tugasnya dalam Program Pelayanan PMI dan Pengembangan Organisasi.

Menurut pedoman Federasi, terdapat beberapa waktu dalam melaksanakan Pelatihan sesuai Siklus Manajemen Relawan;

- a) Pelatihan Pra-Pelayanan/ Orientasi dimulai saat Pengurus dan Staf yang membidangi Relawan pertama kali bertemu dengan Relawan. Sementara melakukan wawancara, disampaikan informasi mengenai Organisasi, visi dan misinya, struktur, dan Kebijakan yang terkait kerelawanan. Pedoman Manajemen Relawan dapat memberikan informasi lebih menyeluruh kepada Relawan.
- b) Pelatihan saat Pelayanan dibangun dengan dasar menyediakan informasi baru dan kesempatan untuk mengembangkan kerja tim. Pertemuan bulanan rutin, dimana Relawan dapat berbagi pengalaman dan saling menyemangati; sesi masukan, dimana rencana dibuat, atau, kesempatan untuk menghadiri seminar memberikan semangat baru dan motivasi positif. Survey Tahunan Relawan dapat digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan Manajemen Relawan.
- c) Pelatihan Transisi memberikan dukungan pada Relawan yang berpengalaman untuk berpindah pada kesempatan baru dalam organisasi. Relawan dapat merasa membutuhkan petualangan dan bimbingan. Pengurus dan Staf yang membidangi Relawan harus sensitif terhadap tanda- tanda 'non verbal' dari Relawan, lalu menginisiasi dialog yang menjelaskan kebutuhan dan keinginan Relawan. Kecenderungan memberi kesempatan kepada Relawan yang sama dapat menimbulkan ketidakadilan dan rasa cemburu. Staf yang membidangi Relawan harusnya bertindak sebagai pembimbing terhadap Relawan yang potensial, termasuk mendukung penguatan dan arah pembinaannya.

Pelatihan yang diadakan oleh PMI Kab/Kota maupun PMI Provinsi terbagi atas tiga macam pelatihan diantaranya sebagai berikut :

1) Pelatihan Dasar KSR

- a) Pelatihan Dasar KSR diadakan sesuai program kerja Pengurus Cabang dan Unit KSR
- b) Jumlah total jam pelajaran adalah 120 jam (120 x 45 JPL) termasuk pengenalan, penyusunan norma dan harapan serta evaluasi, atau 12 hari efektif jika dilaksanakan terus-menerus (jika rata - rata dalam sehari berlangsung 10 Jam).
- c) Untuk memenuhi jumlah kurikulum 120 jam tersebut, PMI Cabang dan Unit KSR dapat melakukannya dengan sistim bertahap, memperhatikan ketersediaan waktu, kemampuan personil (Pelatih dan Fasilitator), ketersediaan perlengkapan dan dana.
- d) Sertifikat dan Kartu Tanda Anggota (KTA) akan diberikan oleh PMI Cabang kepada KSR PMI yang telah mengikuti keseluruhan materi Pelatihan Dasar sesuai Standarisasi Pelatihan PMI.
- e) Anggota TSR dapat mengikuti materi Pelatihan Dasar KSR, apabila materi tersebut dibutuhkan untuk menunjang pelayanan yang akan dilakukan.
- f) Tempat dan waktu Pelatihan ditentukan oleh Pengurus Cabang bersama- sama dengan Unit KSR atau Kelompok TSR, Pejabat Perguruan Tinggi, Lembaga, Instansi, Perusahaan atau badan swasta yang membutuhkan.

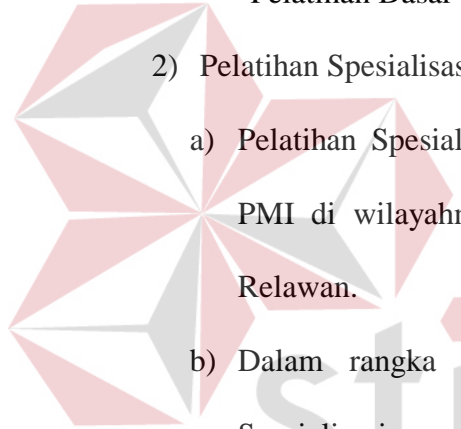
- g) Pada saat Pelatihan Dasar KSR, telah mulai diidentifikasi kemampuan masing-masing anggota untuk mengikuti Pelatihan ke jenjang yang lebih lanjut.
- h) Untuk dapat membantu mengetahui dengan baik bakat/ minat KSR ybs dapat diberikan test psikologi (dapat dilakukan oleh TSR psikolog yang dipunyai oleh PMI Cabang/ Daerah).
- i) Pedoman terkait Pelatihan Dasar KSR dapat melihat di Buku:

"Pelatihan Dasar KSR, Panduan Fasilitator/ Pelatih"

"Pelatihan Dasar KSR, Kumpulan Materi"

2) Pelatihan Spesialisasi

- a) Pelatihan Spesialisasi diselenggarakan sesuai kebutuhan pelayanan PMI di wilayahnya, dengan memperhatikan kemampuan anggota Relawan.
- b) Dalam rangka "Back to Basic" ke mandat pelayanan PMI, Spesialisasi yang harus dimiliki oleh PMI Cabang adalah:



INSTITUT BISNIS
& INFORMATIKA
stikom
SURABAYA

Tabel 2.1 Jenis Pelatihan Spesialisasi di PMI

Prioritas I	Prioritas II	Prioritas III
1) Assesment 2) Pertolongan pertamadan evakuasi korban bencana 3) Pemulihan hubungan keluarga 4) Komunikasi dan kehumasan	1) Dapur umum 2) Pelayanan kesehatan 3) Pelayanan ambulance 4) Psycho-sosial support	1) Penampungan dan pengungsian 2) Air dan sanitasi 3) Distribusi relief

Catatan:

Relawan (KSR-TSR) dengan Spesialisasi pada Prioritas I wajib dimiliki oleh PMI Cabang, terutama PMI Cabang di daerah Rawan Bencana. Apabila kapasitas PMI Cabang mendukung, maka dapat menyiapkan Relawan (KSR-TSR) dengan kompetensi Spesialisasi lainnya (Prioritas II dan Prioritas III)

- c) Anggota KSR dapat mengikuti Pelatihan Spesialisasi apabila telah mengikuti Pelatihan Dasar KSR terlebih dahulu
- d) Anggota TSR yang akan mengikuti Pelatihan Spesialisasi, harus mengikuti materi Dasar terlebih dahulu Contoh; Setelah mengikuti materi Pertolongan Pertama Dasar 30 Jam, baru dapat mengikuti Pelatihan Spesialisasi 70 Jam.
- e) Untuk dapat mengikuti pelatihan spesialisasi, seorang anggota Relawan PMI (KSR-TSR) wajib mengikuti beberapa kegiatan/

penugasan PMI serta tercatat aktif dalam menunjang program kegiatan PMI selama minimal 1 tahun.

- f) Anggota KSR yang telah mengikuti Pelatihan Spesialisasi dan anggota TSR yang 11 memiliki kompetensi tertentu dapat bergabung dalam Wadah SATGANA .
- g) PMI Cabang/ Daerah/ Pusat, Unit KSR maupun Kelompok TSR dapat melaksanakan Pelatihan Spesialisasi, sesuai kurikulum yang ada pada Standarisasi Pelatihan PMI dan dimonitor oleh Pelatih Utama bersama- sama dengan PMI di semua tingkatan.
- h) Diklat KSR spesialisasi dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 periode kepengurusan PMI, atau sesuai kebutuhan PMI Cabang. Apabila dalam pendataan relawan yang telah mengikuti pelatihan spesialisasi tidak ada lagi di PMI Cabang ybs. atau tidak aktif, maka PMI Cabang harus mengisi/ melatih relawannya agar pelayanan PMI tetap dapat dilakukan.
- i) Adanya jejaring antara Unit KSR, Kelompok TSR, PMI Cabang, Daerah dan Pusat dalam melaksanakan Pelatihan spesialisasi.

3) Pelatihan Pendukung Atau Tambahan

PMI Cabang dapat menyelenggarakan materi tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan program dan pelayanan PMI di wilayahnya. Contoh: Pertolongan gedung bertingkat, Pertolongan di Air, Bahasa, komputer, dll.

PMI Provinsi Jawa Timur mempunyai 38 Cabang, yakni Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto,

Kab. Jombang, Kab. Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Kab. Lumajang, Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Rulungagung, Kab. Trenggalek, Kota Blitar, Kab. Blitar, Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi, dan Kab. Bangkalan, Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, Kab. Sumenep, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan.

2.2.1. Visi PMI provinsi jawa timur

Palang Merah Indonesia (PMI) mampu dan siap menyediakan pelayanan kepalangmerahan dengan cepat dan tepat dengan berpegang teguh pada Prinsip - prinsip Dasar Palang Merah Internasional.

Menyebarkan, mengembangkan dan mendorong aplikasi secara konsisten prinsip dasar gerakan Palang Merah Internasional. Dengan melaksanakan peningkatan kemampuan organisasi secara berkelanjutan agar mampu melaksanakan tugas – tugas

2.2.2. Misi PMI provinsi jawa timur

1. Kesiap-siagaan di dalam Penanggulangan Bencana dan Konflik yang berbasis pada masyarakat.
2. Bantuan dalam bidang kesehatan, termasuk bantuan kesehatan dalam keadaan darurat yang berbasis pada masyarakat.
3. Pengelolaan Transfusi Darah secara profesional

4. Dukungan dalam HIV / AIDS yang mencakup usaha preventif, antistigma dan diskriminasi, serta dukungan dan kepedulian terhadap ODHA (Orang dengan HIV / AIDS) dan keluarganya.
5. Pengembangan dan penguatan kapasitas organisasi di seluruh jajaran PMI guna meningkatkan kualitas potensi sumber daya manusia, sumber daya dan dana agar visi misi dan program PMI dapat diwujudkan secara berkesinambungan.

2.2.3. Tujuan Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur

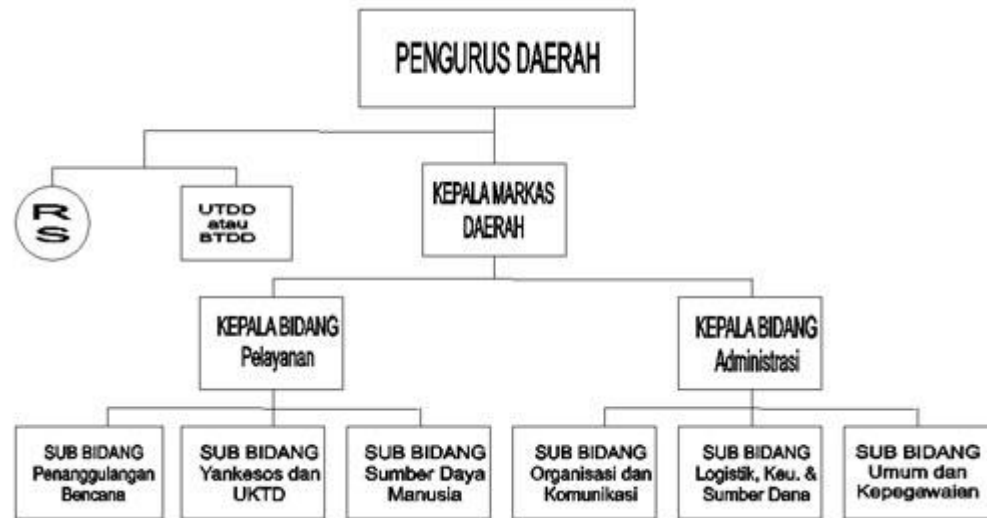
Meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya, yang tidak membedakan golongan, bangsa, kulit, jenis kelamin, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2.2.4. Kegiatan Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur

Program - program yang dilaksanakan oleh PMI Provinsi Jawa Timur dalam rentang waktu lima tahun terakhir meliputi:

1. Penanggulangan Bencana (PB),
2. Program pelayanan kesehatan,
3. Program pelayanan sosial,
4. Program peningkatan fungsi / peran komunikasi dan informasi
5. serta program yang ditujukan untuk pengembangan kapasitas organisasi.

2.3 Struktur Organisasi Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur



Gambar Struktur Organisasi Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PMI Provinsi Jawa Timur

Tugas dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam struktur bagian adalah sebagai berikut :

1. Kepala markas daerah PMI Provinsi Jawa Timur

Kepala markas daerah PMI Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk memimpin dan mengelola seluruh kegiatan Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur secara efektif dan efisien sesuai misi dan tujuan PMI sebagaimana telah ditetapkan.

2. Kepala Bidang Pelayanan PMI Provinsi Jawa Timur

Kepala Bidang Pelayanan PMI Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pelayanan seperti halnya pelayanan sosial dan kesehatan serta penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur.

3. Kepala Bidang Administrasi PMI Provinsi Jawa Timur

Kepala Bidang Administrasi PMI provinsi jawa timur mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola organisasi, logistik dan kepegawaian serta anggaran pada PMI Provinsi Jawa Timur.

4. Sub. Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Jawa Timur

Sub. Bidang Penanggulangan Bencana PMI provinsi Jawa Timur mempunyai Tugas pokok dan fungsi untuk merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan kesiapsiagaan bencana guna mempersiapkan diri menghadapi bencana yang bisa tiba-tiba terjadi khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur.

5. Sub. Bidang Yankesos dan UKTD PMI Provinsi Jawa Timur

Sub. Bidang Yakesos dan UKTD PMI provinsi Jawa Timur mempunyai Tugas pokok dan fungsi untuk merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pelayanan sosial dan kesehatan.

6. Sub. Bidang Sumber daya Manusia PMI Provinsi Jawa Timur

Sub.Bidang Sumber Daya Manusia PMI provinsi Jawa Timur mempunyai Tugas pokok dan fungsi untuk mengatur, manajemen dan menangani masalah perekrutan, pelatihan dan penugasan relawan PMI khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur.

7. Sub. Bidang Organisasi dan Komunikasi PMI Provinsi Jawa Timur

Sub.Bidang Organisasi dan Komunikasi PMI provinsi Jawa Timur mempunyai Tugas pokok dan fungsi adalah menangani masalah organisasi PMI kab/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dan menjalin komunikasi dengan tiap PMI kab/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur.

8. Sub. Bidang Logistik, Keuangan, dan Sumber Dana PMI Provinsi Jawa Timur

Sub.Bidang Logistik, Keuangan dan Sumber Dana PMI provinsi Jawa Timur mempunyai Tugas pokok dan fungsi untuk mengatur dan merencanakan proses pengadaan Logistik, serta mengatur keuangan dan sumber dana keluar dan masuk pada PMI Provinsi Jawa Timur.

9. Sub. Bidang Umum dan Kepegawaian

Sub.Bidang Umum dan Kepegawaian PMI provinsi Jawa Timur mempunyai Tugas pokok dan fungsi untuk merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan rekrutmen pegawai pada PMI Provinsi Jawa Timur.

2.4 Kondisi Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur

PMI Provinsi Jawa Timur memiliki 608 Ranting yang tersebar di 38 Cabang. Sedangkan Unit Transfusi Darah (UTD) memiliki 37

Kabupaten / Kota meliputi: Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Malang, Kota Malang, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Kab. Lumajang, Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek, Kota Blitar, Kab. Blitar, Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Jember, dan Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban. Kab. Lamongan, Kab. Sampang, Kab. Sumenep, Kab. Bangkalan.

Sesuai data tahun 2009 Sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung PMI Provinsi Jawa Timur adalah 82.625 anggota PMR PMI sedangkan TSR sebanyak 3.180 anggota, 3.309 anggota KSR, 1644 anggota Pembina, 413 orang Pengurus Cabang dan 24 Staf Markas.

Fasilitas pendukung dalam melaksanakan tujuh Prinsip Palang Merah yang dimiliki PMI Provinsi Jawa timur sebagai berikut: Pos Pertolongan Pertama sebanyak minimal satu unit setiap PMI Kab / Kota.

BKIA / Klinik Bersalin berada di PMI Kab. Malang memiliki dua unit, yaitu daerah Peniwen kec. Kromengan dan Karang Pandan Kec. Pakisaji.

Ada tujuh Cabang PMI yang memiliki Balai Pengobatan, meliputi: PMI Kab. Malang terdiri dari Pakisaji Karangpandan, Kepanjen, Sukonolo Kepanjen, Pakis Singosari, Lawang, Turen, Dampit, Tirtoyudho, Ampel Gading, Gondang Legi, Sumber Pucung, Koromengan, Kalipare, Donomulyo, Wagir, Dau. Sedangkan PMI Kab. Ponorogo memiliki satu

tempat terletak di Jl. Dr. Soetomo No. 7; PMI Kab. Jember memiliki satu tempat balai pengobatan yang terletak di Jl. Brawijaya No. 61 A; PMI Kab. Magetan juga memiliki 1 Balai Pengobatan terletak di Jl. Jend. Mt. Haryono no. 14. Dan PMI Kota Surabaya memiliki dua Balai pengobatan yang terletak di Jl. Bubutan dan daerah Bratang, serta PMI Kab. Banyuwangi memiliki 1 Balai pengobatan di daerah Jl. Kartini No. 5; PMI Kota Probolinggo memiliki 1 Balai Pengobatan klinik yang buka selama 24 jam, terletak di Jl. Soekarno Hatta 271 Probolinggo.

PMI memiliki PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat) yang menangani pengobatan Gawat Darurat di PMI Kab. Malang sebanyak dua unit bertempat di Jl. Raya Bedali Lawang dan Kebon Agung No. 123, serta PMI Kab. Jember bertempat di Jl. Brawijaya No. 61 A Jember.

Untuk pengembangan Sumber daya manusia baik Pengurus maupun Staf hingga Relawan PMI memiliki Pusdiklat dan Outbond yang terletak di Jl. Ratna Kel. Kembangan Kec. Kebomas Kabupaten Gresik.

PMI Provinsi Jawa Timur juga mempunyai Tim Satgana sebanyak 1.078 orang yang setiap Kab / Kota memiliki satu Tim Satgana yang terdiri dari 30 orang personil KSR dan TSR yang akan berfungsi dalam memberikan pelayanan kepalangmerahan. Sedangkan TBRC (Tim Bantuan Reaksi Cepat) sebanyak 210 orang.

